

**ANALISIS PERKEMBANGAN DAN PERBANDINGAN  
KINERJA KUANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM  
OTONOMI DAERAH PADA KABUPATEN SUKOHARJO DAN  
KABUPATEN SRAGEN**



Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

**CLARA ADISTI**  
**B 200 050 369**

**FAKULTAS EKONOMI AKUNTANSI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SURAKARTA  
2010**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Pergantian kepemimpinan di pemerintahan Indonesia sebagian besar banyak memberikan perubahan di berbagai bidang. Salah satu perubahan yang terjadi adalah dari pemerintah yang berbentuk sentralistik, yaitu pemerintahan yang bertujuan menjadikan bangsa Indonesia lebih maju dan sejahtera secara pemerintahan terpusat, kemudian diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai revisi dari UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah. Menurut UU No.32 tahun 2004 menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah ditetapkan dan dilaksanakan berdasarkan atas asas desentralisasi, asas dekonsentrasi, dan atas tugas pembantuan. Dengan demikian dalam rangka desentralisasi dibentuk dan disusun Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kota. Selain itu dikeluarkan juga UU No.33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sebagai revisi UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Dari UU tersebut diharapkan lebih mendukung pemberdayaan Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintah.

Pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan mendasar pada sistem pemerintahan yang ada. Salah satu perubahan mendasar pada sistem pemerintahan yang dimaksud adalah penyelenggaraan otonomi yang luas, nyata, dan

bertanggungjawab kepada daerah. Di samping sebagai strategi untuk menghadapi era globalisasi, Otonomi Daerah (Otonomi daerah) merupakan tuntutan masyarakat daerah sebagai reaksi atas ketidakadilan ekonomi yang mereka terima selama ini. Pemberian otonomi secara luas kepada Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan keistimewaan, kekhususan serta potensi keanekaragaman daerah. Secara nyata diharapkan disintegrasi yang selama ini mengancam kehidupan bernegara dan bermasyarakat dapat diminimalkan. Otonomi Daerah merupakan pemberdayaan dalam pengambilan keputusan secara lebih leluasa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki sesuai dengan kepentingan prioritas dan potensi daerah sendiri. Dengan adanya otonomi kabupaten dan kota maka pengelolaan keuangan sepenuhnya berada di tangan pemerintah daerah karena daerah kabupaten atau kota berhubungan langsung dengan masyarakat.

Kemampuan Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang menggambarkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai kegiatan pelaksanaan tugas pembangunan. Keberhasilan otonomi Daerah diketahui dari ketergantungan kepada Pemerintah Pusat lebih kecil dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar dalam membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah dalam periode waktu tertentu. Kemampuan Pemerintah Daerah dalam bidang keuangan salah satunya PAD, menjadi tolak ukur adanya peningkatan pertumbuhan ekonomi tiap-tiap daerah pada pelaksanaan otonomi Daerah.

Untuk dapat mengukur kinerja pemerintah perlu diketahui indikator-indikator kinerja sebagai dasar penilaian kinerja. Adanya indikator kinerja akan membantu pemerintah dalam proses pengambilan keputusan anggaran dan dalam mengawasi kinerja anggaran pemerintah. Pemerintah Daerah sebagai pihak yang disertai tugas menjalankan pada pemerintahan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah Pemerintah Daerah dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Analisis rasio keuangan sebagai salah satu alat analisis telah banyak digunakan untuk menilai kinerja lembaga atau organisasi yang bersifat *profit oriented*, namun masih sangat jarang dilakukan pada lembaga atau organisasi yang bersifat *non profit oriented* khususnya pemda. Menurut Widodo (2001:261), penyusunan APBD selama ini berdasarkan asas perimbangan “*incremental budget*,” di mana masing-masing komponen pendapatan dan belanja besarnya dihitung dengan meningkatkan sejumlah prosentase tertentu (berdasarkan tingkat inflasi), sehingga mengabaikan adanya rasio keuangan dalam APBD.

Pembangunan daerah sebagai suatu bagian dari pembangunan nasional dilaksanakan berdasarkan prinsip otda dan pengaturan sumber daya manusia yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Analisis rasio keuangan adalah yang suatu usaha untuk mengidentifikasi ciri-ciri keuangan berdasarkan laporan keuangan yang tersedia. Analisis rasio keuangan selanjutnya digunakan untuk:

1. Menilai kemandirian daerah dalam membiayai penyelenggaraan otda.
2. Mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.

3. Mengukur sejauh mana aktivitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya.
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah.
5. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan mengeluarkan yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Menurut Halim (2002:127), dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokrasi, efektif, efisien, dan fleksibel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki perusahaan swasta. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti mengambil judul “Analisis Perkembangan dan Perbandingan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Daerah Pada Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Sragen”. Alasan dalam membandingkan dua kabupaten tersebut, karena jumlah PAD yang berbeda dan diperkirakan kedua kabupaten mampu membiayai pembangunan daerahnya tanpa campur tangan Pemerintah Pusat.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah, maka penulis dapat mengemukakan rumusan permasalahannya, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Sragen tahun anggaran 2004-2006 dengan diberlakukannya otonomi?

2. Bagaimana perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Sragen tahun anggaran 2004-2006?

### **C. Pembatasan Masalah**

Penelitian ini hanya menekankan pada permasalahan mengenai penilaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Sragen, dengan menggunakan analisis rasio keuangan selama periode tiga tahun, yaitu dari tahun 2004-2006.

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Menganalisis bagaimana perkembangan kinerja keuangan Pemerintah Daerah tahun 2004-2006 di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Sragen.
2. Menganalisis bagaimana perbandingan kinerja keuangan Pemerintah Daerah tahun 2004-2006 di Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Sragen.

### **E. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian dapat digunakan sebagai bahan informasi maupun bahan pertimbangan berbagai pihak, antara lain:

1. Bagi Pemerintah Daerah

Diharapkan masing-masing Pemerintah Daerah mampu mengoptimalkan sumber PAD dan sebagai alternatif masukan untuk meningkatkan pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah secara ekonomis, efisien, dan efektif demi tercapainya keberhasilan pelaksanaan otda.

## 2. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat memberikan pengalaman belajar dan tambahan pengetahuan mengenai penilaian kinerja keuangan Pemerintah Daerah yang diteliti, serta untuk membandingkan teori dari studi kuliah dengan kenyataan yang sebenarnya.

## 3. Bagi Pembaca

Selain dapat digunakan sebagai gambaran sejauh mana perbandingan dan perkembangan kinerja keuangan antara Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Sragen, penelitian ini juga dapat digunakan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang topik yang sama.

## **F. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun dan dikelompokkan ke dalam lima bab. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

### **BAB I      PENDAHULUAN**

Berisi tentang uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II      TINJAUAN PUSTAKA**

Dalam bab ini akan diuraikan secara detail tentang pengertian Akuntansi Pemerintahan, Otda, dan Analisis Laporan Keuangan. Selain itu pula dikelompokkan pula tentang penelitian terdahulu.

### BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang metode penelitian, jenis data dan sumber data, metode pengumpulan data, serta analisis data.

### BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN

Membahas hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti dengan menjelaskan mengenai deskripsi umum Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Sragen, analisis data dan pembahasannya.

### BAB V PENUTUP

Dalam bab ini berisi simpulan yang diperoleh, keterbatasan penelitian, dan saran-saran yang perlu untuk disampaikan.